

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Atribusi

Menurut Fritz Heider sebagai pencetus teori atribusi, teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dll ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Luthans, 2005)

Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu

Fritz Heider juga menyatakan bahwa kekuatan internal (atribut personal seperti kemampuan, usaha dan kelelahan) dan kekuatan eksternal (atribut lingkungan seperti aturan dan cuaca) itu bersama-sama menentukan perilaku

manusia. Dia menekankan bahwa merasakan secara tidak langsung adalah determinan paling penting untuk perilaku.

Atribusi internal maupun eksternal telah dinyatakan dapat mempengaruhi terhadap evaluasi kinerja individu, misalnya dalam menentukan bagaimana cara atasan memperlakukan bawahannya, dan mempengaruhi sikap dan kepuasan individu terhadap kerja. Orang akan berbeda perilakunya jika mereka lebih merasakan atribut internalnya daripada atribut eksternalnya.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori atribusi karena peneliti akan melakukan studi empiris untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi auditor terhadap kualitas hasil audit, khususnya pada karakteristik personal auditor itu sendiri. Pada dasarnya karakteristik personal seorang auditor merupakan salah satu penentu terhadap kualitas hasil audit yang akan dilakukan karena merupakan suatu faktor internal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas.

2.1.2. Auditing

Auditing merupakan salah satu jasa yang diberikan oleh akuntan publik yang diperlukan untuk memeriksa kewajaran suatu laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya oleh para pemakai laporan keuangan. Pada prinsipnya auditing merupakan suatu kegiatan yang membandingkan kondisi yang ada dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kondisi yang dimaksud merupakan keadaan yang seharusnya dapat digunakan auditor sebagai pedoman untuk mengevaluasi informasi dalam lingkup akuntansi dan keuangan.

Menurut Sukrisno Agoes, Jan Husada (2012:44) pengertian audit adalah : Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Menurut *American Accounting Association (AAA): Auditing is systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economic actions and events to ascertain the degree of correspondence between those assertions and established criteria and communicating the results to interested user.*

Menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens dan Amir Abadi Jusuf (2011): *Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.* Tersimpulkan dari beberapa pengertian diatas, bahwa audit terdiri atas (Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati 2013) :

- 1 Proses Sistematis
- 2 Memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif
- 3 Assersi (informasi)
- 4 Kriteria yang ditetapkan
- 5 Kompeten dan Independen
- 6 Pelaporan

7 Pihak-pihak yang berkepentingan

2.1.3. *International Standards on Auditing (ISA)*

International Standards on Auditing (ISA) dikeluarkan oleh *International Auditing Practice Committee (IAPC)* dari *International Federal of Accountants (IFAC)*. IAPC berusaha untuk meningkatkan keseragaman praktik auditing dan jasa-jasa terkait diseluruh dunia. Pedoman paling luas yang tersedia adalah 10 standar yang berlaku umum (*generally accepted auditing standards = GAAS*), yang dikembangkan oleh AICPA dan terakhir kali diperbaharui dengan SAS 105 dan SAS 113. ISA secara umum serupa dengan GAAS di AS meskipun ada perbedaan. ISA tidak mengesampingkan peraturan-peraturan yang berlaku di suatu Negara yang mengaudit atas informasi keuangan atas informasi lainnya.

Pada tanggal 23 Mei 2012 Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) Kementerian Keuangan dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) melakukan *public hearing* dan sosialisasi *exposure draft* dari standar audit berbasis *International Standart on Auditing (ISA)*. Indonesia akan mengadopsi ISA dalam audit laporan keuangan periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2013.

KAP Indonesia yang mempunyai jaringan global (seperti *The Big Four*) dan jaringan internasional lainnya (banyak di antaranya *second-tier firms*) melayani klien global dan internasional yang mengadopsi standar-standar IFAC. Beberapa di antaranya sejak awal 2000-an sudah aktif melatih partner dan staf audit mereka dengan mengenalkan ketentuan-ketentuan dan kewajiban yang ditetapkan ISA (Theodorus M. Tuanakotta, 2013).

Ciri yang menonjol dari auditing berbasis ISA ialah penekanan terhadap aspek risiko. ISA dan IFRS adalah standar-standar berbasis prinsip (principles-based standards), yang merupakan perubahan dari standar-standar sebelumnya yang berbasis aturan (rules-based standards). ISAs menekankan (dan berulang-ulang menggunakan istilah “the auditor shall” dalam setiap ISA) penggunaan profesional judgment. Dalam bahasan materialitas, lebih jelasnya telah diatur dalam ISA 320. Alinea 8 dari ISA 320 menyatakan: “Tujuan auditor adalah menerapkan secara tepat konsep materialitas dalam merencanakan dan melaksanakan audit”.

2.1.4. Kualitas Audit

2.1.4.1. Pengertian Kualitas Audit

Menurut Elfarini (2007) kualitas audit adalah segala kemungkinan (*probability*) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.

Sawyer's (2006) mengungkapkan peningkatan kualitas sebuah audit dapat diukur oleh beberapa hal berikut ini:

1. terselesaikannya audit di bawah *time budget* yang telah ditetapkan.

Apabila seorang mampu menyelesaikan proses audit tersebut di bawah *time budget* yang telah ditetapkan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa telah

tercapainya peningkatan kualitas audit yang dilakukan oleh auditor dalam menghasilkan laporan auditnya.

2. Menghasilkan temuan dan rekomendasi yang bermanfaat.

Mendapatkan temuan dan memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi klien, menjadikan tolak ukur bahwa kualitas audit telah menunjukkan adanya peningkatan.

3. Tercapainya sasaran dan tujuan dari audit.

Peningkatan kualitas audit dapat diukur dengan melihat tercapai atau tidaknya sasaran dan tujuan pelaksanaan program audit yang dilaksanakan oleh auditor.

4. Meningkatkan jumlah permintaan pekerjaan audit.

Peningkatan kualitas audit dalam suatu KAP dapat dilihat dari dua hal. Pertama, dari peningkatan laporan audit yang diterbitkan oleh perusahaan yang menggunakan jasa KAP, seandainya terjadi peningkatan laporan audit yang diterbitkan dari suatu KAP maka dapat diketahui bahwa jumlah permintaan audit di KAP tersebut meningkat, begitu pula sebaliknya. Kedua, dengan mendapatkan informasi dari KAP yang bersangkutan, hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti wawancara dan kuesioner.

2.1.4.2. Indikator Kualitas Audit

Kualitas Audit variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen DeAngelo (1981) yang terdiri dari delapan instrumen dengan menggunakan Skala Likert 5 point pernyataan positif. Adapun indikator dari kualitas audit adalah sebagai berikut:

1. Kualitas audit tidak berkaitan dengan mampu tidaknya auditor menemukan salah saji yang material
2. Kualitas audit tidak berkaitan dengan kemampuan auditor dalam menemukan kecurangan (*Fraud*)
3. Kualitas audit berkaitan dengan ketepatan auditor dalam memberikan opini audit
4. Kualitas audit tidak berkaitan dengan kemampuan auditor memberikan laporan audit tepat waktu
5. Kualitas audit berkaitan dengan kemampuan auditor mengidentifikasi risiko bisnis klien secara tepat waktu
6. Kualitas audit berkaitan dengan ada tidaknya tuntutan hukum pada auditor dari pihak-pihak yang dirugikan atas auditnya
7. Kualitas audit berkaitan dengan kemampuan auditor mendeteksi perataan laba (*Income Smoothing*)
8. Kualitas audit tidak berkaitan dengan kemampuan auditor memberi solusi atas permasalahan bisnis yang dihadapi klien

2.1.5. Kompetensi

2.1.5.1. Pengertian Kompetensi

Siswanto (2003) mendefinisikan kompetensi sebagai kemampuan manusia (yang dapat ditunjukkan dengan karya, pengetahuan, keterampilan, perilaku, sikap, motif atau bakatnya) ditemukan secara nyata dapat membedakan antara mereka yang sukses dengan mereka yang biasa saja di tempat kerja. Watson Wyatt dalam Ruky (2004) mengemukakan bahwa kompetensi merupakan

kombinasi dari keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan perilaku yang dapat diamati dan diterapkan secara kritis untuk suksesnya sebuah organisasi dan prestasi kerja serta kontribusi pribadi karyawan terhadap organisasinya (Sartika, 2015).

Hutapea dan Thoha (2008) ada beberapa jenis kompetensi yaitu:

1. Kompetensi teknis atau fungsional (*technical/functional competences*) atau dapat juga disebut dengan istilah *hard skills/hard competency* (kompetensi keras). Konsentrasi kompetensi teknis adalah pada pekerjaan, yaitu untuk menggambarkan tanggung jawab, tantangan, dan sasaran kerja yang harus dilakukan atau dicapai oleh si pemangku jabatan agar si pemangku jabatan dapat berprestasi dengan baik.
2. Kompetensi perilaku (*behavioral competencies*) atau dapat juga disebut dengan istilah kompetensi lunak (*soft skills/soft competency*). Kompetensi perilaku lebih menekankan pada perilaku produktif yang harus dimiliki serta diperagakan oleh seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan agar dapat berprestasi luar biasa.
3. Kompetensi pengetahuan atau penekanan pengertian kompetensi jenis ini adalah kepemilikan pengetahuan dan keterampilan.

Kompetensi auditor adalah kemampuan auditor untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya dalam melakukan audit sehingga auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat, intuitif, dan obyektif (Ahmad, 2011). Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa audit harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan dan pelatihan teknis cukup sebagai

auditor. Untuk melakukan proses pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan umum dan khusus, pengetahuan mengenai bidang auditing dan akuntansi serta memahami industri klien (Widiastuty, 2003). Selain itu, untuk melakukan tugas pengauditan auditor juga perlu memiliki pengalaman. Auditor yang berpengalaman memiliki keunggulan dalam hal menemukan kesalahan, memahami kesalahan secara akurat, dan mencari penyebab kesalahan (Brown dan Stanner, 2007). Pengalaman yang dimaksudkan adalah pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu, maupun banyaknya penugasan yang pernah dilakukan (Arens, 2006) sehingga dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki dapat meningkatkan kualitas proses audit.

2.1.5.2. Indikator Kompetensi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sukriah, Akram dan Inapty (2009) variabel kompetensi dalam penelitian ini digunakan 10 item pertanyaan yang diukur dengan 5 poin skala Likert, yaitu nilai 1=sangat tidak setuju, 2=tidak setuju, 3=netral, 4=setuju, dan 5=sangat setuju. Adapun indikator pengukuran dari kompetensi adalah sebagai berikut:

1. Auditor harus memiliki rasa ingin tahu yang besar, berpikiran luas dan mampu menangani ketidakpastian.
2. Auditor harus dapat menerima bahwa tidak ada solusi yang mudah, serta menyadari bahwa beberapa temuan dapat bersifat subyektif.
3. Auditor harus mampu bekerja sama dalam tim.
4. Auditor harus memiliki kemampuan untuk melakukan review analitis.

5. Auditor harus memiliki pengetahuan tentang teori organisasi untuk memahami organisasi.
6. Auditor harus memiliki pengetahuan auditing dan pengetahuan tentang sektor publik.
7. Auditor harus memiliki pengetahuan tentang akuntansi yang akan membantu dalam mengolah angka dan data.
8. Auditor harus memiliki keahlian untuk melakukan wawancara serta kemampuan membaca cepat.
9. Auditor harus memahami ilmu statistik serta mempunyai keahlian menggunakan komputer
10. Auditor memiliki kemampuan untuk menulis dan mempresentasikan laporan dengan baik.

2.1.6. Independensi

2.1.6.1. Pengertian Independensi

Independensi merupakan sikap mental auditor yang bebas dari pengaruh pihak luar. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 2011 SA seksi 220 tentang independensi menjelaskan bahwa auditor yang bersikap independen, yaitu auditor yang tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Auditor berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas laporan auditor, seperti calon-calon pemilik dan kreditur.

Independensi menurut Arens dkk. (2008) berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias. Auditor tidak hanya harus independen dalam fakta, tetapi juga harus independen dalam penampilan. Independensi dalam fakta (*independence in fact*) ada bila auditor benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak bias sepanjang audit, sedangkan Independensi dalam penampilan (*independent in appearance*) adalah hasil dari interpretasi lain atas Independensi ini.

Independensi menurut Mulyadi (2010) berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya

Menurut Messier, dkk (2005), independensi merupakan suatu istilah yang sering digunakan oleh profesi auditor. Independensi menurut standar umum SA seksi 220 dalam SPAP (2011) PSA No.4, mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal ia praktik sebagai auditor intern).

Dalam lampiran 2 SPKN disebutkan bahwa: “Gangguan pribadi yang disebabkan oleh suatu hubungan dan pandangan pribadi mungkin mengakibatkan pemeriksa membatasi lingkup pertanyaan dan pengungkapan atau melemahkan temuan dalam segala bentuknya. Pemeriksa bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada pejabat yang berwenang dalam organisasi pemeriksanya

apabila memiliki gangguan pribadi terhadap independensi. Gangguan pribadi dari pemeriksa secara individu meliputi antara lain:

- a. Memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan jajaran manajemen entitas atau program yang diperiksa atau sebagai pegawai dari entitas yang diperiksa, dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh langsung dan signifikan terhadap entitas atau program yang diperiksa.
- b. Memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung pada entitas atau program yang diperiksa.
- c. Pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas atau program yang diperiksa dalam kurun waktu dua tahun terakhir.
- d. Mempunyai hubungan kerjasama dengan entitas atau program yang diperiksa.
- e. Terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan obyek pemeriksaan, seperti memberikan asistensi, jasa konsultasi, pengembangan sistem, menyusun dan/atau mereviu laporan keuangan entitas atau program yang diperiksa.
- f. Adanya prasangka terhadap perorangan, kelompok, organisasi atau tujuan suatu program, yang dapat membuat pelaksanaan pemeriksaan menjadi berat sebelah.

2.1.6.2. Indikator Independensi

Pengukuran variabel independensi dalam penelitian ini, digunakan instrumen yang dikembangkan oleh Mautz dan Sharaf (1980). Pada variabel ini digunakan 9 item pertanyaan yang diukur dengan 5 poin skala Likert, yaitu nilai

1=sangat tidak setuju, 2=tidak setuju, 3=netral, 4=setuju, dan 5=sangat setuju.

Adapun indikator dari independensi adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan program audit bebas dari campur tangan pimpinan untuk menentukan, mengeliminasi atau memodifikasi bagian-bagian tertentu yang diperiksa
2. Penyusunan program audit bebas dari intervensi pimpinan tentang prosedur yang dipilih auditor.
3. Penyusunan program audit bebas dari usaha-usaha pihak lain untuk menentukan subyek pekerjaan pemeriksaan
4. Pemeriksaan bebas dari usaha-usaha manajerial (objek pemeriksaan) untuk menentukan atau menunjuk kegiatan yang diperiksa
5. Pelaksanaan pemeriksaan harus bekerjasama dengan manajerial selama proses pemeriksaan
6. Pemeriksaan bebas dari kepentingan pribadi maupun pihak lain untuk membatasi segala kegiatan pemeriksaan
7. Pelaporan bebas dari kewajiban pihak lain untuk mempengaruhi fakta-fakta yang dilaporkan
8. Pelaporan hasil audit bebas dari bahasa atau istilah-istilah yang menimbulkan multi tafsir
9. Pelaporan bebas dari usaha pihak tertentu untuk mempengaruhi pertimbangan pemeriksa terhadap isi laporan pemeriksaan

2.1.7. Integritas

2.1.7.1. Pengertian Integritas

Menurut Agus Suryo Sulaiman (2010) mengatakan bahwa integritas adalah: “Tentang keseluruhan nilai-nilai kejujuran, keseimbangan, memberi kembali, dedikasi, kredibilitas dan berbagai hal pengabdian diri pada nilai-nilai kemanusiaan dalam hidup”. Menurut Sumartono (2004) dalam Agustini (2014) bahwa integritas adalah “bersikap jujur, konsisten, komitmen, berani, dan dapat dipercaya”. Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan dimana auditor harus mentaati bentuk standar teknis dan etika, bersikap jujur dan transparan, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit serta tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang berkualitas.

Buttery, Hurford, dan Simpson (1993) sebagaimana dikutip oleh (Rai, 2008) dalam Cahyono, dkk (2015) menyebutkan beberapa mutu personal lainnya yang harus dimiliki oleh seorang auditor, seperti: kepandaian (inteligensi), kemampuan komunikasi, perilaku yang baik, komitmen yang tinggi, serta kemampuan imajinasi yang baik untuk menciptakan sikap yang kreatif dan penuh inovasi. Disamping itu, auditor harus memiliki integritas yang tinggi serta dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik, karena dalam audit kinerja banyak dilakukan wawancara dan permintaan keterangan dari auditi untuk memperoleh data. Standar APIP yang mengatur tentang persyaratan minimum individu auditor maupun organisasi APIP telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Persyaratan minimum yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang auditor adalah kompetensi, independensi, obyektifitas, dan kepatuhan terhadap kode etik. Kode etik yang dimaksud pada standar audit APIP mengatur tentang integritas, obyektifitas, dan kompetensi auditor (Cahyono, dkk, 2015).

Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional (Agoes, 2012). Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas merupakan kualitas yang menjadikan timbulnya kepercayaan masyarakat dan tatanan nilai tertinggi bagi anggota profesi dalam menguji semua keputusannya. Seorang auditor harus bersikap jujur dan transparansi, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Keempat unsur itu diperlukan untuk membangun kepercayaan dan memberikan keputusan yang andal bagi pengambilan keputusan, sehingga kualitas audit akan menjadi baik dan kinerja akan menjadi baik (Prameswari, 2015). Maka apabila internal auditor memiliki integritas yang tinggi, pemeriksaan akan dilakukan secara jujur, bijaksana dan bertanggungjawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal. Keputusannya akan mencerminkan kondisi yang sebenarnya dari bukti-bukti yang dikumpulkan. Dengan demikian jaminan atas keluaran yang diberikan dapat dipercaya oleh

semua pihak yang berkepentingan. Keluaran yang memiliki mutu yang baik mencerminkan kinerja internal auditor baik (Prameswari, 2015).

2.1.7.2. Indikator Integritas

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sukriah, Akram dan Inapty (2009), indikator yang digunakan untuk mengukur integritas adalah 14 item pertanyaan yang diukur dengan 5 poin skala Likert, yaitu nilai 1=sangat tidak setuju, 2=tidak setuju, 3=netral, 4=setuju, dan 5=sangat setuju. Adapun indikator dari integritas meliputi:

1. Auditor harus taat pada peraturan-peraturan baik diawasi maupun tidak diawasi.
2. Auditor harus bekerja sesuai keadaan yang sebenarnya, tidak menambah maupun mengurangi fakta yang ada.
3. Auditor tidak menerima segala sesuatu dalam bentuk apapun yang bukan haknya.
4. Auditor tidak dapat diintimidasi oleh orang lain dan tidak tunduk karena tekanan yang dilakukan oleh orang lain guna mempengaruhi sikap dan pendapatnya.
5. Auditor mengemukakan hal-hal yang menurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan.
6. Auditor harus memiliki rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi berbagai kesulitan.
7. Auditor selalu menimbang permasalahan berikut akibat-akibatnya dengan seksama.

8. Auditor mempertimbangkan kepentingan negara.
9. Auditor tidak mempertimbangkan keadaan seseorang/sekelompok orang atau suatu unit organisasi untuk membenarkan perbuatan melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Auditor tidak mengelak atau menyalahkan orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian orang lain.
11. Auditor memiliki rasa tanggung jawab bila hasil pemeriksaannya masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan.
12. Auditor memotivasi diri dengan menunjukkan antusiasme yang konsisten untuk selalu bekerja.
13. Auditor bersikap dan bertindak sesuai dengan norma yang berlaku.
14. Dalam menyusun rekomendasi, auditor harus berpegang teguh kepada ketentuan/peraturan yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan agar rekomendasi dapat dilaksanakan.

2.1.8. Akuntabilitas

2.1.8.1. Pengertian Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari Bahasa Inggris “*accountability*” yang memiliki arti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Tetlock (1984) mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya (Diani Mardisar dan Ria, 2007).

Peran dan tanggung jawab auditor diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh IAI ataupun *Statement on Auditing Standards* (SAS) yang dikeluarkan oleh *Auditing Standards Board* (ASB). Adapun peran dan tanggung jawab auditor yaitu:

- a. Tanggung jawab mendeteksi dan melaporkan kecurangan (*fraud*), kekeliruan, dan ketidakberesan.
- b. Tanggung jawab mempertahankan sikap independensi dan menghindari konflik.
- c. Tanggung jawab mengkomunikasikan informasi yang berguna tentang sifat dan hasil proses audit.
- d. Tanggung jawab menemukan tindakan melanggar hukum dari klien.

Diani Mardisar dan Ria (2007) mengatakan bahwa kualitas hasil pekerjaan auditor dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) yang dimiliki oleh auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Oleh karena itu akuntabilitas merupakan salah satu faktor penting yang harus dimiliki auditor dalam melaksanakan tugasnya.

Pengabdian kepada profesi merupakan suatu komitmen yang terbentuk dari dalam diri seorang profesional, dalam hal ini adalah auditor, tanpa paksaan dari siapapun. Auditor memiliki kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis mereka kepada organisasi, profesi, masyarakat, dan pribadi mereka sendiri di mana akuntan publik mempunyai tanggung jawab menjaga integritas dan obyektivitasnya. Auditor yang memiliki akuntabilitas tinggi akan bertanggung

jawab penuh terhadap pekerjaannya sehingga kualitas audit yang dihasilkan pun akan semakin baik.

2.1.8.2. Indikator Akuntabilitas

Pengukuran variabel akuntabilitas dalam penelitian ini, digunakan instrumen yang dikembangkan oleh Aji (2009). Pada variabel ini digunakan 7 item pertanyaan yang diukur dengan 5 poin skala Likert, yaitu nilai 1=sangat tidak setuju, 2=tidak setuju, 3=netral, 4=setuju, dan 5=sangat setuju. Indikator variabel akuntabilitas meliputi:

1. Saya akan bertanggung jawab atas semua tindakan dan keputusan yang telah saya ambil
2. Saya akan mencurahkan semua daya pikir (usaha) saya sepenuhnya dalam menyelesaikan pekerjaan audit
3. Saya sering melakukan intropeksi diri.
4. Saya akan menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan dengan apa adanya yang menjadi tanggung jawab saya.
5. Saya akan mempertahankan hasil audit saya meskipun berbeda dengan hasil audit rekan lainnya dalam tim
6. Hasil audit saya benar-benar dimanfaatkan oleh penentu kebijakan sehingga akan memberi pengaruh yang cukup besar bagi peningkatan kualitas pelayanan publik
7. Kesungguhan saya dalam menjalankan tugas sering dipengaruhi dengan mood (suasana hati)

2.1.9. Etika Auditor

2.1.9.1. Pengertian Etika Auditor

Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2006), “Etika secara garis besar dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral.” Prinsip etika di Indonesia tidak secara khusus dirumuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, tetapi dianggap menjiwai kode perilaku akuntan di Indonesia. Menurut Daft (2002), “Etika (*Ethics*) adalah aturan mengenai prinsip-prinsip dan nilai-nilai moral yang mengatur perilaku seseorang atau kelompok mengenai apa yang benar dan apa yang salah.” Berdasarkan kedua pengertian di atas, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa etika adalah prinsip dan nilai moral yang akan mempengaruhi seseorang dalam pelaksanaan tindakannya.

Etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesi dengan profesi lain, yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para anggotanya. Tanpa etika, profesi akuntan tidak akan ada karena fungsi akuntan adalah sebagai penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis.

Menurut Magnis-Suseno (1985) etika normatif terbagi atas dua yaitu, tolak ukur pertanggungjawaban moral meliputi etika wahyu, etika peraturan, etika situasi dan etika relativisme. Sedangkan etika normatif menuju kebahagiaan meliputi egoisme, pengembangan diri dan utilitarisme. Disamping itu, Hardjoeno

(2002) membagi jenis etika atas empat kelompok yaitu, etika normatif, etika peraturan, etika situasi dan etika relativisme.

Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik sebagai seperangkat prinsip-prinsip moral yang mengatur tentang perilaku profesional. Kode etik yaitu norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Dalam etika profesi, sebuah profesi memiliki komitmen moral yang tinggi, yang biasanya dituangkan dalam bentuk aturan yang khusus yang menjadi pegangan bagi setiap orang yang mengemban profesi yang bersangkutan. Aturan ini sebagai aturan main dalam menjalankan profesi tersebut yang biasa disebut sebagai kode etik yang harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap profesi.

Menurut Sihwahjoeni dan Gudono (2000), “Kode Etik Akuntan adalah norma yang mengatur hubungan antara akuntan dengan kliennya, antara akuntan dengan sejawatnya, dan antara profesi dengan masyarakat.” Menurut IAI, “Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung-jawab profesionalnya.”

Auditor harus mematuhi kode etik yang ditetapkan. Pelaksanaan audit harus mengacu pada standar audit ini, dan auditor wajib mematuhi kode etik yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari standar audit. Kode etika ini dibuat bertujuan untuk mengatur hubungan antara :

1. Auditor dengan rekan sekerjanya,
2. Auditor dengan atasannya,
3. Auditor dengan auditan (objek pemeriksanya)
4. Auditor dengan masyarakat.

Pengertian etika menurut Firdaus (2005) adalah perangkat prinsip moral atau nilai. Masing-masing orang memiliki perangkat nilai, sekalipun tidak dapat diungkapkan secara eksplisit. Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan karakteristik nilai-nilai sebagian besar dihubungkan dengan perilaku etis yaitu kejujuran, integritas, mematuhi janji, loyalitas, keadilan, kepedulian kepada orang lain, menghargai orang lain, menjadi warga yang bertanggungjawab, mencapai yang terbaik dan ketanggungan (Firdaus, 2005).

Sejumlah besar nilai etika dalam masyarakat tidak dapat dimasukkan dalam undang-undang karena sifat nilai tertentu yang memerlukan pertimbangan. Sebagian besar orang mendefinisikan perilaku tidak beretika sebagai perilaku yang berbeda dari sesuatu yang seharusnya dilakukan. Masing-masing orang menentukan apa yang dianggap tidak beretika, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Penting untuk memahami mengapa orang bertindak tidak beretika menurut kita.

Terdapat penyebab orang tidak beretika atau standar etika seseorang berbeda dari masyarakat secara keseluruhan atau seseorang memutuskan untuk bertindak semaunya yaitu: standar etika seseorang berbeda dari masyarakat umum, dan seseorang memilih bertindak semaunya. Manusia senantiasa dihadapkan pada kebutuhan untuk membuat keputusan yang memiliki konsekuensi bagi diri mereka sendiri maupun orang lain. Seringkali dilema etika yang berasal dari pilihan membawa kebaikan pada pihak lain. Pada situasi seperti ini, orang harus mengajukan dua pertanyaan penting yaitu “kebaikan apa yang saya cari? Dan apa kewajiban saya dalam kondisi seperti ini? (Boyton dkk, 2003).

2.1.9.2. Indikator Etika Audit

Variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen Ulum (2005) dan Suraida (2005) yang terdiri dari delapan instrumen dengan menggunakan Skala Likert 5 point yang tidak sepenuhnya menggunakan pernyataan positif namun juga pernyataan negatif. Indikator dari etika audit meliputi:

1. Auditor harus memiliki rasa ingin tahu yang besar, berpikiran luas dan mampu menangani ketidakpastian.
2. Auditor harus dapat menerima bahwa tidak ada solusi yang mudah, serta menyadari bahwa beberapa temuan dapat bersifat subyektif.
3. Auditor harus mampu bekerja sama dalam tim.
4. Auditor harus memiliki kemampuan untuk melakukan review analitis.
5. Auditor harus memiliki pengetahuan tentang teori organisasi untuk memahami organisasi.

6. Auditor harus memiliki pengetahuan auditing dan pengetahuan tentang sektor publik.
7. Auditor harus memiliki pengetahuan tentang akuntansi yang akan membantu dalam mengolah angka dan data.
8. Auditor harus memiliki keahlian untuk melakukan wawancara serta kemampuan membaca cepat.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada beberapa peneliti, yaitu:

Sukriah, dkk (2009) menguji pengaruh Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Populasi penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Inspektorat sepulau Lombok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman kerja, obyektifitas dan kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. sedangkan untuk independensi dan integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Suwardi (2010) menguji pengaruh tekanan anggaran waktu dan kompleksitas audit terhadap kualitas audit. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 44 auditor junior dan auditor senior yang bekerja pada KAP yang terdaftar di BPK dan KAP yang ada di Yogyakarta. Hasilnya menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu dan kompleksitas audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Badjuri (2011) menguji pengaruh independensi, pengalaman, *due professional care* dan akuntabilitas terhadap kualitas audit. Populasi dalam penelitian ini adalah para auditor yang bekerja pada KAP di Wilayah Jawa Tengah 2011. Hasilnya menunjukkan bahwa: Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. *Due professional care* auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Martini (2011) menguji pengaruh independensi, pengalaman, *due profesional care*, akuntabilitas, etika auditor terhadap kualitas audit. Penentuan sampel dalam penelitian ini disesuaikan dengan jumlah auditor pada masing - masing Kantor Akuntan Publik di Wilayah Jakarta Barat. Hasilnya menunjukkan bahwa: Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Pengalaman berpengaruh positif terhadap kualitas audit. *Due professional care* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Etika Auditor berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Saripudin, dkk (2012) menguji pengaruh independensi, pengalaman, *due professional care* dan akuntabilitas terhadap kualitas audit. Populasinya adalah semua auditor yang bekerja pada KAP dan terdaftar di Directory IAPI, di Jambi dan Palembang. Hasilnya menunjukkan bahwa: Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Pengalaman berpengaruh positif terhadap kualitas audit. *Due professional care* auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Arisanti, dkk (2013) menguji pengaruh independensi, pengalaman kerja, *due professional care*, akuntabilitas dan kompetensi terhadap kualitas audit. Populasinya adalah auditor yang beraktivitas pada KAP di wilayah kota Padang dan Pekanbaru. Hasilnya menunjukkan bahwa: Independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. *Due professional care* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Ningsih dan Yaniartha (2013) menguji pengaruh Kompetensi, Independensi, *Time Budget Pressure* terhadap kualitas audit. Populasinya adalah seluruh auditor yang bekerja pada KAP di Bali. Hasilnya menunjukkan bahwa: Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. *Time Budget Pressure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Nirmala (2013) menguji pengaruh independensi, pengalaman, *due professional care*, akuntabilitas, kompleksitas audit, dan *time budget pressure* terhadap kualitas audit. Populasinya adalah auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah dan DIY. Hasilnya menunjukkan bahwa: Independensi, pengalaman, *due professional care*, akuntabilitas, dan *time budget pressure* secara parsial mempengaruhi kualitas audit, sedangkan kompleksitas audit tidak berpengaruh pada kualitas audit.

Widiarta (2013) menguji pengaruh gender, umur, kompleksitas tugas terhadap kualitas audit. Populasinya adalah seluruh auditor yang bekerja pada

KAP di Bali. Hasilnya menunjukkan bahwa: Jenis kelamin (*gender*) berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Umur berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Kompleksitas tugas berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Futri dan Juliarsa (2014) menguji pengaruh Kompetensi, Independensi, *Time Budget Pressure* terhadap kualitas audit. Populasinya adalah seluruh auditor yang bekerja pada KAP di Bali. Hasilnya menunjukkan bahwa: Independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Etika Profesi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Kepuasan Kerja Auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Ventje Ilat, dkk (2015) menguji pengaruh independensi, obyektivitas, pengalaman kerja, pengetahuan, serta integritas auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara. Populasi dalam penelitian ini adalah semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Inspektorat tingkat kota/kabupaten di provinsi Sulawesi Utara. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan pendekatan *purposive sampling*. Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa variable Independensi, Pengetahuan dan integritas tidak signifikan berpengaruh terhadap kualitas hasil audit sedangkan variabel obyektivitas dan pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit artinya, semakin obyektif auditor internal, semakin banyak pengalaman kerja seorang auditor internal maka semakin baik kualitas hasil audit.

Berdasarkan perbedaan hasil dari penelitian tersebut dan masih banyak lagi penelitian lainnya, maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama / Tahun	Variabel yang digunakan	Hasil Penelitian
1	Sukriah, dkk (2009)	Variabel bebas: Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas dan Kompetensi Variabel terikat: kualitas audit	Pengalaman kerja, obyektifitas dan kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil Pemeriksaan. sedangkan untuk independensi dan integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.
2	Suwardi (2010)	Variabel bebas: tekanan anggaran waktu dan kompleksitas audit Variabel terikat: kualitas audit	Tekanan anggaran waktu dan kompleksitas audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit
3	Badjuri (2011)	Variabel bebas: Independensi, Pengalaman, Due Professional Care dan Akuntabilitas Variabel terikat: kualitas audit	a. Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. b. Pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. c. <i>Due professional care</i> auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. d. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
4	Martini (2011)	Variabel bebas: Independensi, Pengalaman, Due Profesional Care, Akuntabilitas, Etika Auditor Variabel terikat: kualitas audit	a. Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. b. Pengalaman berpengaruh positif terhadap kualitas audit. c. <i>Due professional care</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit. d. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. e. Etika Auditor berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.
5	Saripudin, dkk (2012)	Variabel bebas: Independensi, Pengalaman, <i>Due Professional Care</i> dan Akuntabilitas Variabel terikat: kualitas audit	a. Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. b. Pengalaman berpengaruh positif terhadap kualitas audit. c. <i>Due professional care</i> auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit d. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
6	Arisanti, dkk (2013)	Variabel bebas: Independensi, Pengalaman Kerja, <i>Due Professional Care</i> , Akuntabilitas dan Kompetensi	a. Independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. b. Pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. c. <i>Due professional care</i> berpengaruh

No	Nama / Tahun	Variabel yang digunakan	Hasil Penelitian
		Variabel terikat: kualitas audit	positif terhadap kualitas audit. d. Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. e. Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
7	Ningsih dan Yaniartha (2013)	Variabel bebas: Kompetensi, Independensi, <i>Time Budget Pressure</i> Variabel terikat: kualitas audit	a. Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. b. Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. c. <i>Time Budget Pressure</i> berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.
8	Nirmala (2013)	Variabel bebas: independensi, pengalaman, <i>due professional care</i> , akuntabilitas, kompleksitas audit, dan <i>time budget pressure</i> Variabel terikat: kualitas audit	Independensi, pengalaman, <i>due professional care</i> , akuntabilitas, dan <i>time budget pressure</i> secara parsial mempengaruhi kualitas audit, sedangkan kompleksitas audit tidak berpengaruh pada kualitas audit
9	Widiarta (2013)	Variabel bebas: gender, umur, kompleksitas tugas Variabel terikat: kualitas audit	a. Jenis kelamin (<i>gender</i>) berpengaruh positif terhadap kualitas audit. b. Umur berpengaruh positif terhadap kualitas audit. c. Kompleksitas tugas berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
10	Futri dan Juliarsa (2014)	Variabel bebas: independensi, profesionalisme, tingkat pendidikan, etika profesi, pengalaman, dan kepuasan kerja auditor Variabel terikat: kualitas audit	a. Independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. b. Profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. c. Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kualitas audit. d. Etika Profesi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. e. Pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. f. Kepuasan Kerja Auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
11	Ventje Ilat, dkk (2015)	Variabel bebas: Independensi, Obyektivitas, Pengalaman Kerja, Pengetahuan dan Integritas Variabel terikat: kualitas audit	Independensi, Pengetahuan dan integritas tidak signifikan berpengaruh terhadap kualitas hasil audit sedangkan variabel obyektivitas dan pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit

Sumber: jurnal penelitian

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan uraian yang dimulai dari latar belakang hingga penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Variabel-variabel yang diduga mempengaruhi kualitas audit adalah kompetensi, independensi, integritas, akuntabilitas, dan etika audit. Kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis



2.4. Hubungan Antar Variabel

2.2.1. Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit

Menurut Kamus Kompetensi LOMA (1998) dalam Lasmahadi (2002) kompetensi didefinisikan sebagai aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja yang memungkinkan dia untuk mencapai kinerja superior. Aspek-aspek pribadi ini mencakup sifat, motif-motif, sistem nilai, sikap, pengetahuan dan ketrampilan dimana kompetensi akan mengarahkan tingkah laku, sedangkan tingkah laku

akan menghasilkan kinerja. Susanto (2000) definisi tentang kompetensi yang sering dipakai adalah karakteristik-karakteristik yang mendasari individu untuk mencapai kinerja superior. Kompetensi juga merupakan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan, serta kemampuan yang dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan non-rutin. Definisi kompetensi dalam bidang auditing pun sering diukur dengan pengalaman (Mayangsari, 2003).

Arens dkk, (2008) menyatakan bahwa auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti itu. Dalam melakukan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus di bidangnya. Kompetensi berkaitan dengan keahlian profesional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, simposium (Suraida, 2005).

Penelitian yang dilakukan Alim, dkk (2007), Sukriah, dkk (2009), Ardini (2010), Badjuri (2012), Lauw Tjun Tjun (2012), Restu Agusti (2012) menemukan bukti empiris bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini berarti bahwa kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki kompetensi yang baik. Semakin tinggi kompetensi seorang auditor maka akan semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{a1} : Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit

2.2.2. Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit

Independensi berarti tidak mudah dipengaruhi, karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Auditor tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun. Karena pentingnya independensi dalam menghasilkan kualitas audit, maka auditor harus memiliki dan mempertahankan sikap ini dalam menjalankan tugas profesionalnya. Independensi merupakan suatu standar auditing yang sangat penting untuk dimiliki oleh auditor. Auditor harus dapat mempertahankan sikap mental independen karena opini yang dikeluarkannya bertujuan untuk menambah kredibilitas laporan keuangan yang disajikan manajemen, sehingga jika auditor tersebut tidak independen maka kualitas audit yang dihasilkan tidak baik.

Penelitian Martini (2011), Badjuri (2011), Saripudin, dkk (2012), Ningsih & Yaniartha (2013) dan Nirmala (2013) menemukan bukti empiris bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{a2} : Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit

2.2.3. Pengaruh Integritas terhadap Kualitas Audit

Alim, dkk (2007) menyatakan bahwa kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki kompetensi yang baik dan hasil penelitiannya menemukan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Auditor sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas audit harus senantiasa meningkatkan pengetahuan yang telah dimiliki agar penerapan pengetahuan dapat maksimal dalam praktiknya.

Sunarto (2003) menyatakan bahwa integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya (Pusdiklatwas BPKP, 2005).

Hasil penelitian yang dilakukan Badjuri (2012), Serlinda Tita, *dkk* (2012) menemukan bukti empiris bahwa integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{a3} : Integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit

2.2.4. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit

Tetlock (1984) dalam Mardisar dan Sari (2007) mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya. Akuntabilitas auditor terdiri dari motivasi, pengabdian pada profesi, dan kewajiban sosial (Aji, 2009).

Secara umum, motivasi merupakan keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Dalam profesi dapat ditunjukkan dengan seberapa besar seorang auditor memiliki motivasi dalam tugasnya memeriksa laporan keuangan. Robbins (2008) mendefinisikan motivasi (*motivation*) sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Pengabdian kepada profesi merupakan komitmen yang terbentuk dalam diri

seorang profesional, tanpa adanya paksaan dari siapapun, dan secara sadar bertanggung jawab terhadap profesinya.

Nugrahaningsih (2005) menyatakan bahwa akuntan memiliki kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi di mana mereka berlandung, profesi mereka, masyarakat, dan pribadi mereka sendiri, di mana akuntan mempunyai tanggung jawab menjadi kompeten dan menjaga integritas serta obyektivitas mereka. Kewajiban sosial merupakan pandangan terhadap pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh, baik oleh masyarakat maupun profesional, karena adanya pekerjaan tersebut (Rendy, 2007). Jika auditor menyadari perannya, maka akan memiliki keyakinan bahwa dengan melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, ia akan memberi kontribusi yang besar bagi masyarakat dan profesinya tersebut.

Penelitian Martini (2011), Badjuri (2011), Saripudin, dkk (2012), Nirmala (2013) dan Ningsih & Yaniartha (2013) yang memberi hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{a4} : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

2.2.5. Pengaruh Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit

Etika merupakan aturan atau norma yang mengatur tingkah laku maupun perilaku seseorang. Seorang Akuntan Publik dalam menjalankan tugasnya dan keputusan auditnya harus mempertimbangkan kode etik etika profesinya sebagai standar pekerjaan. Etika profesi dibutuhkan untuk meyakinkan masyarakat karena

masyarakat akan mempercayai profesi seseorang jika telah menerapkan standar mutu yang tinggi dalam pelaksanaan pekerjaannya.

Etika profesi berkaitan erat dengan masalah prinsip yang dipegang Akuntan Publik untuk menjaga, menjunjung, serta menjalankan nilai-nilai kebenaran dan moralitas, seperti tanggung jawab profesi dan perilaku profesional. Semakin tinggi etika yang dijunjung Akuntan Publik maka diharapkan kualitas audit yang dihasilkan semakin tinggi pula.

Penelitian yang dilakukan Futri & Juliarsa (2014) menemukan bukti empiris bahwa etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Semakin tinggi etika auditor maka semakin tinggi kualitas audit. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{a5} : Etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

